

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi program peningkatan kerja telah dibahas dalam beberapa penelitian terdahulu. (Dunn, 2003) Evaluasi program peningkatan kesempatan kerja menggunakan evaluasi sistematis, dimana memandang dengan cara adil pada program yang dijalani, dan bisa mengukur akibatnya kepada warga serta sepanjang mana pencapaiannya dengan rencana tujuan pembangunan berkepanjangan. Dengan cara khusus penilaian kebijaksanaan berhubungan dengan penciptaan data hal angka ataupun khasiat hasil kebijaksanaan. Alhasil kebijaksanaan yang dijalani bisa membagikan hasil berbentuk output serta outcome. Menurut Weis dalam (Handrian et al., 2021) analisis evaluasi bermaksud pada pengukuran output serta outcome dari suatu program ataupun kebijaksanaan dengan analogi pengukuran atas kemampuan, kejujuran penerapan, serta lain- lain yang berhubungan dengan standar- standar penerapan.

Evaluasi mempunyai fungsi utama dalam kebijakan, pertama memberikan informasi valid terkait kebijakan, sehingga dapat memberikan informasi sejauh mana pencapaian tujuan tersebut. Seperti yang dikatakan (Dunn, 2003) Fungsi utama evaluasi awal membagikan data asi terpaut kemampuan kebijaksanaan, kedua berikan partisipasi keterangan serta kritikan pada angka yang jadi dasar penentuan tujuan serta sasaran, ketiga membagikan donasi pada aplikasi tata cara analisa kebijaksanaan lain tercantum pada perihal formulasi permasalahan serta saran.

James Anderson menyebutkan (Sekarsari & Winarno, 2018) sudah memilah jenis penilaian kedalam sebagian jenis, ialah(1) penilaian kebijaksanaan dimengerti selaku aktivitas fungsional,(2) jenis penilaian yang mementingkan diri pada

bekerjanya kebijaksanaan ataupun programprogram khusus,(3) jenis penilaian kebijaksanaan sistematis.

Disisi lain dalam penelitian terdahulu (Djunaedi, 2009) metode analisis tren eksponensial yang melukiskan pergerakan gaya naik ataupun turun dalam waktu jauh yang didapat dari pada umumnya pergantian dari durasi ke durasi (nilai cukup merata (halus) Dari sini dapat dikemukakan bahwa, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Barat perlu menentukan target yang harus dicapai agar pengamatan pengembang sektor lapangan usaha mampu dapat dibuat seimbang untuk dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

(Sudarsono, 1986) Penetapan sasaran peluang kegiatan wajib memikirkan upaya buat meningkatkan daya produksi yang ialah dasar perkembangan ekonomi di era depan. Perkembangan ekonomi umumnya berhubungan dengan keahlian buat berkembang. Keahlian perkembangan ialah tumpuan untuk ekonomi warga buat berkembang. Ketergantungan antara tumpuan serta perkembangan terlihat pada ikatan fungsional antara penciptaan serta masukan yang dibutuhkan. Salah satu tumpuan itu merupakan daya produksi daya kegiatan.

Menurut (Muslihatinningsih et al., 2020) Bila perekonomian sesuatu wilayah besar, hingga hendak terwujud pasar daya kegiatan yang besar pula. Dalam bentuk equilibrium(penyeimbang) pasar daya kegiatan, imbalan riil berganti buat menyamakan ijab serta permohonan daya kegiatan. Namun sepanjang ini imbalan tidak selamanya fleksibel dengan kemajuan bagus dari permohonan serta ijab itu sendiri, dapat pula terjalin imbalan riil terhalang di atas tingkatan equilibrium yang diketahui dengan dengan kekakuan imbalan (*wage rigidity*). Kekakuan imbalan ini hendak menimbulkan rendahnya absorpsi daya kegiatan. Menurut (Mankiw, 2012)

Rendahnya penyerapan daya kerja yang diakibatkan kekakuan imbalan dampak adaptasi antara jumlah pekerja yang membutuhkan profesi serta jumlah profesi yang ada.

2.1 KERANGKA TEORI

2.1.1 Kebijakan Progam Peningkatan Kesempatan Produktivitas Tenaga

Kerja

Peluang kerja merupakan jumlah yang membuktikan berapa orang yang sudah ataupun bisa tertampung dalam sesuatu industri. Peluang kerja bisa direalisasikan dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang membolehkan di lakukannya wujud kegiatan yang dikenal bekerja tersebut. Dengan begitu peluang kegiatan bisa diartikan sebagai permintaan atas daya kegiatan.

Invensi peluang kegiatan merupakan tahap yang pas, mengenang ijab daya kegiatan yang lebih besar dari permintaanya. Keunggulan daya kegiatan yang lebih besar dari permintaanya. Keunggulan tenaga kegiatan ini umumnya ialah tenaga kerja tidak ahli, alhasil tidak butuh rasanya ekspansi pemodalan pada proyek cetak biru padat produksi, bukan pada kemajuan zona kapitalitas dengan ciri penting padat modal selaku hasil dari alternatif berarti pembangunan yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang besar. Masyarakat yang berperan terlibat serta terhambur di bermacam sektor, tetapi masing- masing zona hadapi perkembangan yang berlainan begitu pula keahlian masing- masing zona berlainan dalam meresap daya kegiatan. Perbandingan laju perkembangan itu menyebabkan 2 perihal, yaitu 1) Ada perbandingan laju peningkatan produktivitas kerja di masing-masing zona. 2) Dengan cara bertahap terjalin transformasi sektoral, bagus dalam penyerapan tenaga kerja ataupun dalam kontribusinya kepada pemasukan nasional.

Perbandingan laju perkembangan pendapatan nasional serta peluang kegiatan itu pula membuktikan perbedaan elastisitas tiap- tiap sector untuk penyerapan tenaga kegiatan. Elastisitas peluang kegiatan didefinisikan sebagai tolok ukur laju perkembangan peluang kerja dengan laju perkembangan ekonomi. Fleksibilitas itu bisa dipakai buat semua perekonomian ataupun buat masing- masing sektor atau sub zona.

Soeharto Sagir (1993;239) menuturkan di Indonesia kesempatan kerja yang terdapat dipecah jadi 11 zona yang dikatakan kalangan Lapangan Usaha Indonesia(KLUI), yang terdiri dari 1) Zona Pertanian, Perkebunan, Perhutanan, Peternakan serta Perikanan;. 2) Zona Pertambangan serta Galian; 3) Zona Pabrik; 4) Zona Gas, Air dan Listrik; 5) Zona Bangunan dan Arsitektur; 6) Zona Perdagangan, Restoran dan Hotel; 7) Zona Pemindahan serta Komunikasi; 8) Zona Bank serta Badan Finansial yang lain; 9) Zona Carter Rumah; 10) Zona Penguasa serta Hankam; 11) Zona Jasa.

Dari 11 zona yang telah disebutkan bahwa yang sangat banyak membagikan peluang kerja adalah sektor pertanian, oleh karena itu Indonesia terkenal dengan sebutan negara agraris karena zona pertanian adalah sektor yang sangat kuat. Begitu juga Kota Batu yang terkenal akan wisata dan pertaniannya.

Namun pertanian ini tidak selamanya dijadikan impian untuk sediakan peluang kerja karena tanah pertanian tidak mungkin dapat meningkat apalagi senantiasa menyusut untuk dijadikan tanah perumahan.

2.1.2 Tahapan Kebijakan Progam Peningkatan Kesempatan Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Dunn, menarangkan kalau dengan cara etimologis, sebutan kebijaksanaan(policy) berawal dari bahasa yunani, Sansekerta, serta latin. Pangkal tutur dalam

bahasa Yunani serta Sanskerta polis (Negara- kota) serta polis (kota) yang dibesarkan dalam bahasa Latin jadi politeia (Negeri) serta kesimpulannya dalam bahasa Inggris policie, yang berarti mengenai permasalahan permasalahan khalayak ataupun administrasi rezim. Laswell serta Kaplan dalam Thoha, Miftah membagikan arti mengenai kebijaksanaan ialah selaku program pendapatan tujuan, angka angka dalam praktek yang terencana.

Menurut Anderson (1979) dalam Winarno melaporkan kalau kebijaksanaan yakni arah kelakuan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh sesuatu aktor maupun sebagian aktor dalam mengatasi suatu kasus atau masalah. Rancangan kebijaksanaan ini memiliki keterkaitan ialah: (1) titik atensi dalam membahas kebijaksanaan mengarah pada arti serta tujuan, bukan suatu yang terjalin sedemikian itu saja melainkan telah direncanakan oleh bintang film bintang film yang ikut serta dalam sistem politik, (2) sesuatu kebijaksanaan tidak berdiri sendiri, namun berhubungan dengan bermacam kebijaksanaan yang lain dalam warga, (3) kebijaksanaan merupakan apa yang sesungguhnya dicoba oleh penguasa serta bukan apa yang di idamkan oleh penguasa, (4) kebijaksanaan bisa bertabiat positif serta negative, serta (5) kebijaksanaan wajib bersumber pada hukum alhasil mempunyai wewenang warga buat mematuinya.

Kebijaksanaan dapat dicermati berlaku seperti konsep filosofis, berlaku seperti suatu produk, berlaku seperti suatu metode, dan berlaku seperti suatu kerangka aktivitas. Berlaku seperti suatu konsep filosofis, kebijaksanaan yakni serangkaian prinsip, atau suasana yang di idamkan; berlaku seperti suatu produk, kebijaksanaan dipandang berlaku seperti serangkaian kesimpulan atau anjuran; berlaku seperti suatu metode, kebijaksanaan dipandang berlaku seperti suatu tata cara dimana melalui tata cara dimana melalui tata cara itu suatu tubuh dapat mengidentifikasi apa yang

diharapkan darinya yakni program dan tata cara dalam mencapai produknya; dan berlaku seperti suatu kerangka aktivitas, kebijaksanaan yakni metode asin berunding dan negosiasi untuk merumuskan isu- rumor dan aturan metode implementasinya.

Bersumber pada bermacam arti para pakar kebijakan publik, kebijakan publik merupakan kebijakan- kebijakan yang terbuat oleh penguasa selaku kreator kebijakan buat menggapai tujuan- tujuan khusus di warga di mana dalam penyusunannya lewat bermacam jenjang. Tahap- tahap pembuatan kebijaksanaan khalayak bagi William Dunn Tahap- tahap kebijakan publik bagi William Dunn. merupakan:

1. Penyusunan Agenda : Skedul setting ialah sesuatu langkah dan metode yang amat berarti dalam realitas kebijaksanaan khalayak. Dalam metode inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang diucap berlaku seperti kasus khalayak dan prioritas dalam skedul khalayak dipertarungkan. Bila suatu rumor sukses memperoleh status selaku permasalahan khalayak, serta memperoleh prioritas dalam skedul khalayak, hingga rumor itu berkuasa memperoleh peruntukan pangkal energi khalayak yang lebih dari rumor lain. Dalam skedul setting pula amat berarti buat memastikan sesuatu rumor khalayak yang hendak dinaikan dalam sesuatu skedul penguasa. Issue kebijaksanaan(policy issues) kerap diucap pula selaku permasalahan kebijaksanaan(policy dilemma). Policy issues umumnya timbul sebab sudah terjalin silang opini di antara para bintang film hal arah aksi yang sudah ataupun hendak ditempuh, ataupun antagonisme pemikiran hal kepribadian kasus itu. Menurut William Dunn (1990), rumor kebijakan ialah produk ataupun guna dari terdapatnya perbincangan bagus mengenai kesimpulan, rincian, uraian ataupun evaluasi atas sesuatu permasalahan khusus. Tetapi tidak seluruh rumor dapat masuk jadi sesuatu skedul kebijaksanaan. Terdapat sebagian Patokan rumor yang dapat dijadikan

skedul kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood serta Gunn, 1986) diantaranya: 1. telah mencapai titik kritis tertentu à jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius; 2. telah mencapai tingkat partikularitas tertentu 3. berdampak dramatis jika tidak dilakukan pemunculan kebijakan oleh pejabat berwenang; 4. menjangkau dampak yang amat luas ; 5. mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat ; 6. menyangkut suatu persoalan yang fashionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya) Karakteristik : Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama. Ilustrasi : Legislator negara dan kosponsornya menyiapkan rancangan undangundang mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih. Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

2. Formulasi Kebijakan : Permasalahan yang telah masuk dalam skedul prosedur setelah itu diulas oleh para kreator prosedur. Permasalahan mulanya didefinisikan buat setelah itu dicari jalan keluar permasalahan yang terbaik. Jalan keluar masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi atau Legitimasi Kebijakan : Tujuan legalitas merupakan buat membagikan otorisasi pada cara bawah rezim. Bila aksi legalitas dalam sesuatu warga diatur oleh independensi orang, masyarakat negeri hendak menjajaki bimbingan penguasa. Tetapi masyarakat negeri wajib yakin kalau aksi penguasa yang legal. Mensupport. Sokongan buat pemerintahan mengarah berdifusi- cadangan dari tindakan bagus serta hasrat bagus kepada aksi penguasa yang menolong badan mentolerir rezim disharmoni. Legalitas bisa diatur lewat akal busuk simbolsymbol khusus. Di mana lewat cara ini orang berlatih buat mensupport penguasa.

4. Penilaian Evaluasi Kebijakan : Dengan cara normal penilaian kebijaksanaan bisa dibilang selaku aktivitas yang menyangkut ditaksir ataupun evaluasi kebijaksanaan yang melingkupi akar, aplikasi serta akibat. Dalam perihal ini, penilaian ditatap selaku sesuatu aktivitas fungsional. Maksudnya, penilaian kebijaksanaan tidak cuma dicoba pada langkah akhir saja, melainkan dicoba dalam semua cara kebijaksanaan. Dengan begitu, penilaian kebijaksanaan dapat mencakup langkah formulasi masalh- masalah kebijaksanaan, program-program yang diusulkan buat menuntaskan permasalahan kebijaksanaan, aplikasi, ataupun langkah akibat kebijaksanaan.

Cara ataupun jenjang pembentukan pemograman pembelajaran. Bagi Banghart and Trull dalam Sa'ud (2007) terdapat sebagian jenjang yang sebaiknya dilewati dalam kategorisasi pemograman pembelajaran, antara lain:

1. *need assessment*, ialah melaksanakan amatan kepada beraneka ragam keinginan ataupun estimasi yang dibutuhkan dalam cara pembangunan ataupun jasa penataran di tiap dasar pembelajaran. Kajian dini ini wajib teliti, sebab guna amatan hendak membagikan masukan

mengenai: (a) pendapatan program lebih dahulu; (b) pangkal energi apa yang ada, serta (c) apa yang hendak dicoba serta gimana tantangan ke depan yang hendak dialami

2. *formulation of goals and objective*, ialah formulasi tujuan serta target pemograman yang akan dicapai. Formulasi tujuan pemograman pembelajaran wajib bersumber pada pada visi, tujuan serta hasil amatan dini mengenai beraneka ragam keinginan ataupun estimasi (*assessment*) layanan pembelajaran yang dibutuhkan.
3. *policy and priority setting*, ialah mengonsep mengenai kesimpulan prioritas kebijaksanaan apa yang hendak dilaksanakan dalam layanan pembelajaran. Kesimpulan prioritas kebijaksanaan ini wajib dipaparkan kedalam strategi bawah layanan pembelajaran yang nyata, supaya mempermudah dalam pendapatan tujuan.
4. *program ad project formulation*, yaitu kesimpulan program serta cetak biru penerapan aktivitas operasional pemograman pembelajaran, menyangkut layanan pedidikan pada pandangan akademik serta non akademik..
5. *feasibility testing*, ialah dicoba percobaan kelayakan mengenai beraneka ragam pangkal energi(pangkal energi dalam atau eksternal; ataupun pangkal energi orang atau material). Bila pemograman disusun bersumber pada pangkal energi yang ada dengan cara teliti serta cermat, hendak menciptakan tingkatan kelayakan konsep pembelajaran yang bagus.
6. Tahap *plan implementation*, yaitu langkah penerapan pemograman pembelajaran buat menciptakan tujuan pembelajaran. Kesuksesan

langkah ini amat didetetapkan oleh:(a) mutu pangkal energi manusianya(kepala sekolah, guru, panitia sekolah, pegawai, serta anak didik);(b) hawa ataupun pola kerjasama dampingi faktor dalam dasar

7. Tahap *evaluation and revision for future plan*, yaitu aktivitas buat memperhitungkan(menilai) tingkatan kesuksesan penerapan program ataupun pemograman pembelajaran, selaku feedback(masukan ataupun korban balik), berikutnya dicoba perbaiki program buat konsep layanan pembelajaran selanjutnya yang lebih bagus.

4.1.1 Evaluasi Kebijakan Progam Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Evaluasi kebijakan (Dunn, 2003) memiliki maksud yang berkaitan, tiap- tiap menunjuk pada aplikasi sebagian rasio angka kepada hasil serta kebijaksanaan program. Dengan cara biasa sebutan penilaian bisa disamakan dengan penganggaran(*appraisal*), pemberian nilai(*rating*) serta evaluasi(*assesment*), perkata yang melaporkan upaya buat menganalisa hasil kebijaksanaan dalam maksud dasar nilainya.

Dalam artian kala hasil kebijaksanaan pada faktanya memiliki angka, perihal ini sebab hasil itu berikan donasi pada tujuan ataupun target. Bisa disimpulkan kalau kebijaksanaan ataupun program sudah menggapai tingkatan kemampuan yang berarti, yang berarti kalau permasalahan kebijakan terbuat nyata ataupun ditangani.

Menurut Michael “pengevaluasi harus mengevaluasi” ialah evaluasi itu sendiri namun sekalian pula ialah tautologi. Sebab itu lupakan asumsi kalau penilaian ialah perkara pandangan ataupun hasrat. Penilaian ialah perkara kenyataan serta akal sehat serta lebih berarti dari yang sangat berarti.

Evaluasi memiliki sebuah arti yang berhubungan, dan setiap menunjuk pada aplikasi beberapa perbandingan nilai pada hasil peraturan dan program. Dengan sebutan penilaian bagi (Dunn, 2003) bisa disamakan dengan penganggaran, pemberian nilai, serta evaluasi, perkata yang melaporkan upaya buat menganalisa hasil kebijaksanaan dalam dasar nilainya. Dalam maksud yang lebih khusus, penilaian bertepatan dengan penciptaan data hal angka atau hasil kebijakan. Evaluasi sistematis melihat program yang dijalani dengan cara adil alhasil bisa mengukur akibatnya kepada warga dan sepanjang mana pendapatan tujuan program. Penilaian analitis ini terfokus memandang akibat program kenaikan peluang kegiatan sepanjang mana program kenaikan peluang kegiatan menanggapi kasus yang dialami warga.

4.1.2 Peningkatan Kesempatan Kerja

Salah satu sasaran dalam pembangunan adalah “diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang” (Dona et al., 2018). Peningkatan kesempatan kerja juga berdampak pada pendapatan nasional karena dapat meningkatkan pendapatan per kapita (Siburian & Anggrainie, 2022). Berartinya profesi pantas dalam menggapai pembangunan berkepanjangan disoroti oleh Tujuan 8 yang bermaksud guna “mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif dan penuh serta pekerjaan yang layak untuk semua”. Pekerjaan yang layak juga dibutuhkan untuk “keluar dari kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif” (Ponto, 2023).

Sebagaimana disebutkan oleh peraturan dimana, “perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia” (Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja). Peningkatan kesempatan kerja

memberikan indikasi jumlah minimum dari kesempatan kerja produktif baru yang perlu diciptakan. Dalam artikel jurnal Strategi Peningkatan Kesempatan Kerja Berbasis Potensi Wilayah, (Carolina, 2018) menyebut “peningkatan kesempatan kerja tidak terlepas dari kemampuan lapangan pekerjaan menyerap tenaga kerja.” Dalam hal ini, “peningkatan kesempatan kerja tidak cukup hanya dengan instrumen-instrumen kebijakan makro, tetapi juga membutuhkan adanya perencanaan ketenagakerjaan yang komprehensif dan integral antara struktur pasar kerja, peningkatan pendidikan dan pelatihan serta instrumen kebijakan di sektor ekonomi dan keuangan”.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia merupakan modal utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi global dan memerlukan kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi dari semua pihak. Terdapat dua jenis kesempatan kerja ialah peluang kerja permanen ataupun senantiasa serta peluang kerja temporer atau dalam waktu singkat (Ilmu Ekonomi ID, 2016). Program peningkatan kesempatan kerja dapat meliputi pelatihan, bursa kerja, penyuluhan, dan pemagangan (Handrian, Rosmita, & Khan, 2020). Strategi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan ramah terhadap ketenagakerjaan terdiri atas dua elemen “a) Strategi dan kebijakan yang membuat proses pertumbuhan ekonomi menjadi lebih memperhatikan aspek ketenagakerjaan dan b) Tindakan yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja tambahan melalui program-program penciptaan lapangan kerja secara langsung” (Sunartono, 2008).